

KESEIMBANGAN NERACA BERAS DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2015

Warastri Laksdiasri
w.laksdiasri@gmail.com

Sukamdi
kamdi_cppps@yahoo.com

Abstract

The goal of this research are (1) analyze the rice balance in Indonesia based on domestic production and consumption, (2) analyze which provinces in Indonesia experience rice surpluses and deficits, and (3) discover the balance of rice imports and exports in Indonesia. This research is quantitative research using secondary data from Statistics Indonesia. The approach used in this research is a spatial approach with spatial comparison analysis. The variables used in this research to calculate the rice balance are rice production, rice consumption, rice import, and rice export. Between 2011 and 2015, Indonesia experienced surpluses of between 16 million and 22 million tons. Provinces that experienced rice deficits were Riau, Bangka Belitung Islands, Jakarta Capital Region, East Nusa Tenggara, Maluku, North Maluku, Papua, and West Papua. To meet demand for rice, these provinces had to transport rice from other provinces or import it from outside Indonesia. Seven provinces experienced rice deficits and thus imported rice. A further twelve provinces experienced rice surpluses but also imported rice. Six provinces simultaneously imported and exported rice within the same year. Three provinces experienced rice deficits but also exported rice, namely the Jakarta Capital Region, East Nusa Tenggara, and Papua.

Keywords: rice balance, surplus, deficit, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis neraca beras Indonesia berdasarkan produksi dan konsumsi dalam negeri, (2) menganalisis provinsi-provinsi di Indonesia yang surplus dan defisit beras, serta (3) mengetahui kondisi keseimbangan neraca beras Indonesia terhadap impor dan ekspor beras. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah spasial dengan analisis komparasi keruangan. Variabel yang digunakan untuk menghitung neraca beras pada penelitian ini adalah produksi beras, konsumsi beras, impor beras, serta ekspor beras. Neraca beras di Indonesia selama pada tahun 2011 – 2015 adalah surplus berkisar antara 16 juta hingga 22 juta ton. Provinsi-provinsi yang memiliki neraca beras defisit adalah Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Untuk mencukupi kebutuhannya, provinsi-provinsi tersebut harus mendatangkan beras dari provinsi lain atau mengimpornya dari negara lain. Terdapat tujuh provinsi yang defisit beras kemudian mengimpor beras. Walau begitu, terdapat pula dua belas provinsi yang sudah surplus beras namun masih juga mengimpor beras. Terdapat enam provinsi yang mengimpor sekaligus mengekspor beras dalam tahun yang sama. Terdapat pula tiga provinsi yang defisit beras namun tetap mengekspor beras, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Kata kunci: neraca beras, surplus, defisit, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang kurang lebih sejauh 5100 km dari 95° Bujur Timur hingga 141° Bujur Timur, serta kurang lebih 2000 km dari 7° Lintang Utara hingga 11° Lintang Selatan (Verstappen, 2013). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), negara dengan seluas 1.913.578,68 km² ini memiliki 17.504 pulau dan 1.300 suku yang terbagi menjadi 34 provinsi (BPS, 2011 dan BPS, 2016). Perbedaan provinsi, pulau dan suku di Indonesia mempengaruhi perbedaan selera, kebiasaan, serta pangan pokok yang dikonsumsi. Selain perbedaan sosial tersebut, perbedaan kondisi alam berupa iklim, kesuburan tanah, relief, serta ketinggian tempat pun turut melatarbelakangi keanekaragaman pangan pokok di Indonesia.

Seperti di Madura, dahulu pangan pokok pada wilayah ini adalah nasi jagung, di Biak Numfor pangan pokoknya adalah jewawut, dan di Papua pangan pokoknya adalah papeda. Perlu disadari bahwa dewasa ini keanekaragaman pangan pokok tersebut semakin kabur. Bahkan menurut *Global Rice Science Partnership* (CGIAR), Indonesia dikenal sebagai negara pengonsumsi beras terbanyak di dunia, dengan rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun sebanyak 127,4 kg (GRiSP, 2013).

Beberapa hal yang melatarbelakangi perubahan pangan pokok tersebut adalah seragamnya jenis bantuan pangan yang diberikan untuk seluruh wilayah Indonesia (yaitu

beras), serta berkembangnya gengsi sosial yang secara implisit mengatakan bahwa masyarakat yang tidak makan beras adalah masyarakat yang kurang mampu (Jhamtani, 2008). Perubahan jenis pangan pokok tersebut akan terjadi secara berkelanjutan, menurun pada generasi yang akan datang. Pada jangka panjang maupun pendek, kondisi ini dapat memicu peningkatan permintaan beras nasional.

Tidak hanya mengenai masalah perubahan jenis pangan pokok, jumlah penduduk yang di Indonesia yang semakin banyak juga merupakan salah satu pemicu peningkatan permintaan beras nasional. Pangan adalah hak manusia. Di Indonesia, hak pemenuhan pangan tersebut telah diatur pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012.

“Bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan ...” (Republik Indonesia, 2012)

Oleh karena itu, berapapun jumlah penduduk Indonesia, negara ini harus berusaha agar hak mendapatkan pangan tersebut dapat terpenuhi.

Di sisi lain, ancaman alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian di Indonesia tak dapat dielakkan. Titik optimal pengolahan lahan pada lahan pertanian yang saat ini berproduksi pun belum diketahui batasnya. Hal tersebut dapat mengancam ketersediaan pangan, khususnya beras.

Neraca bahan makanan merupakan salah satu alat perencanaan

pada bidang pangan dan gizi. Neraca ini menyajikan menyajikan berbagai data yang mampu menggambarkan ketersediaan suatu komoditas untuk dikonsumsi oleh penduduk pada suatu wilayah (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016). Dengan kata lain, neraca bahan makanan dapat memuat data berupa penyediaan pangan dari produksi dalam negeri maupun impor, serta penggunaannya (Fahriyah, 2015).

Manfaat dari penyusunan neraca bahan makanan tersebut adalah tersedianya data olahan mengenai ketersediaan pangan per kapita suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan olahan data ini, pemangku kebijakan diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengambil kebijakan (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016).

Neraca bahan makanan tersebut dapat dianalisis pada cakupan mikro maupun makro. Pada cakupan mikro, keseimbangan neraca bahan makanan dapat dilihat dari seimbangannya kebutuhan dan ketersediaan makanan pada tingkat rumah tangga. Pada cakupan makro, keseimbangan neraca bahan makanan dapat dilihat dari seimbangannya penawaran dengan permintaan beras nasional. Secara khusus, neraca bahan makanan yang akan diteliti pada penelitian memiliki cakupan makro, yaitu Indonesia dan provinsi-provinsinya. Komoditas pangan yang diteliti adalah beras, sehingga neraca yang akan dibuat pada penelitian ini adalah neraca beras.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi ketersediaan beras di

Indonesia: surplus atau defisit; provinsi mana saja yang mengalami surplus dan yang mengalami defisit beras; serta kondisi keseimbangan neraca beras terhadap impor dan ekspor beras. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis neraca beras Indonesia (pada skala provinsi dan nasional) berdasarkan produksi dan konsumsi beras dalam negeri tahun 2011 – 2015; (2) menganalisis provinsi mana saja yang mengalami surplus dan defisit beras di Indonesia tahun 2011 – 2015; dan (3) mengetahui kondisi keseimbangan neraca beras Indonesia terhadap impor dan ekspor beras tahun 2011 – 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Variasi publikasi yang digunakan adalah buku Statistik Indonesia, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035, Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia (Ekspor) Menurut Kode SITC, serta Statistik Perdagangan Luar Negeri (Impor) Jilid III. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah produksi padi dalam negeri, konsumsi beras nasional (didapat dari perhitungan jumlah penduduk dan konsumsi beras per kapita per hari), ekspor beras, serta impor beras.

Neraca beras yang dibuat pada penelitian ini telah mengalami modifikasi serta penyederhanaan tabel agar sesuai dengan tujuan penelitian. Sebelum menghitung neraca beras,

satuan produksi padi harus dikonversi menjadi beras terlebih dahulu. Rumus yang digunakan untuk mengonversi satuan padi menjadi beras tersebut menggunakan rumus dari Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Benih (s)} &= P \times 0,9\% \\ \text{Pakan ternak (f)} &= P \times 0,44\% \\ \text{Tercecer (w)} &= P \times 5,4\% \\ \text{Pnet} &= P - (s + f + w) \\ \text{Rnet} &= c \times \text{Pnet}\end{aligned}$$

Keterangan:

P = produksi padi

Pnet = produksi netto padi

Rnet = produksi netto beras

c = 0,632

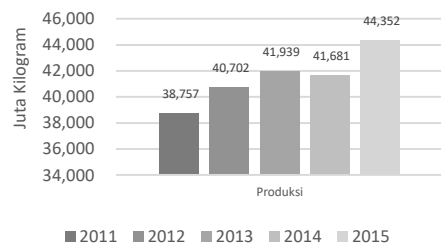
(Republik Indonesia, 2010)

Adapun konsumsi beras didapatkan dari mengalikan konsumsi beras per kapita per hari dengan jumlah penduduk dan jumlah hari dalam setahun (365 hari). Hasil perhitungan neraca beras tersebut akan dibandingkan dengan kondisi impor dan ekspor beras, sehingga kondisi keseimbangan neraca beras terhadap impor dan ekspor dapat diketahui. Hasil dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparasi keruangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi beras dalam negeri pada tahun 2011 – 2015 berkisar antara 38 juta ton hingga 44 juta ton. Rata-rata produksi pada lima tahun ini adalah 41.486.164.371 kg (Gambar 1). Jumlah ini telah mengantarkan Indonesia sebagai produsen beras terbanyak

ketiga di dunia, menurut FAO (t.t), setelah Tiongkok, dan India.



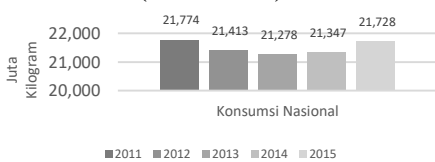
Gambar 1. Grafik Produksi Beras di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (2016)

Peningkatan jumlah produksi beras tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman maraknya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, pemerintah menerapkan strategi ekstensifikasi serta intensifikasi. Strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah sertifikasi lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Lahan yang telah disertifikasi tersebut berfungsi sebagai lahan pertanian abadi, seperti yang telah diatur pada Undang-Undang nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain ekstensifikasi, intensifikasi juga dilakukan pemerintah sebagai upaya peningkatan hasil produksi beras dalam negeri. Upaya intensifikasi yang telah dilakukan tersebut adalah pengembangan sumberdaya air, kebijakan subsidi pupuk, pengembangan alat dan mesin pertanian, serta penyediaan bibit unggul pertanian.

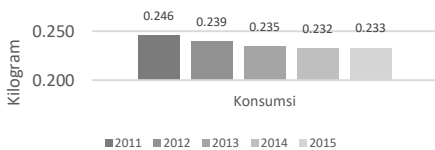
Kebutuhan beras nasional pada tahun 2011 – 2015 berkisar pada angka 21 juta ton (Gambar 2). Kondisi kebutuhan tersebut tidak lepas dari pola pangan beras di masyarakat serta jumlah penduduk Indonesia. Rata-rata

konsumsi beras per kapita per hari penduduk Indonesia selama lima tahun ini adalah 0,237 kg per kapita per hari (Gambar 3). Berdasarkan grafik tersebut, tampak ada kecenderungan penurunan pola pangan beras di masyarakat tiap tahunnya. Menurut Sayekti (2002), hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kondisi ekonomi masyarakat pada tingkat rumah tangga. Peningkatan kondisi ekonomi secara tidak langsung akan mengubah pola pangan pada masyarakat. Pola pangan tersebut akan cenderung berubah dari beras menjadi olahan biji-bijian nontradisional (gandum), serta makanan berprotein tinggi (pada umumnya hasil peternakan).

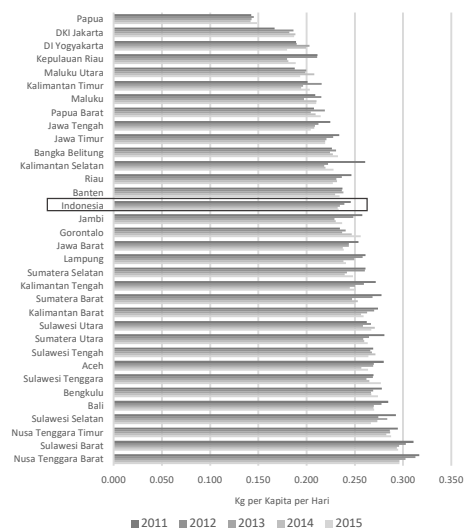
Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki pola pangan beras paling tinggi di Indonesia (Gambar 4). Namun karena jumlah penduduknya tidak sebanyak jumlah penduduk provinsi-provinsi di Pulau Jawa, kebutuhan beras per provinsi per tahunnya pun tidak lebih banyak dibandingkan kebutuhan beras di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, dan lain-lain (Gambar 5).



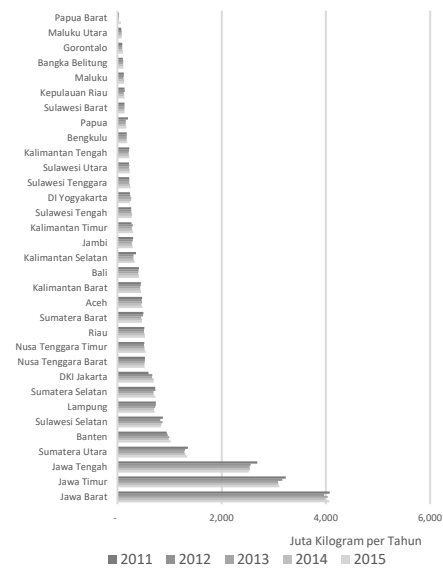
Gambar 2. Grafik Kebutuhan Beras di Indonesia
Sumber: Hasil perhitungan



Gambar 3. Grafik Konsumsi Beras per Kapita per Hari di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (2012, 2013, 2014, 2015)



Gambar 4. Grafik Konsumsi Beras per Kapita per Hari Per Provinsi
Sumber: Badan Pusat Statistik (2012, 2013, 2014, 2015)



Gambar 5. Grafik Kebutuhan Beras Per Provinsi
Sumber: Hasil perhitungan

Berdasarkan dinamika produksi dan konsumsi Indonesia dan provinsi-provinsinya, keseimbangan neraca beras dari cakupan wilayah tersebut dapat diketahui. Sebagian besar provinsi memiliki neraca beras

surplus, namun masih ada pula yang memiliki neraca beras defisit (Gambar 6). Neraca beras surplus menunjukkan bahwa produksi beras pada provinsi tersebut lebih besar dibandingkan dengan kebutuhannya. Adapun neraca beras defisit menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan beras masyarakatnya lebih banyak dibandingkan dengan produksi beras per provinsi.

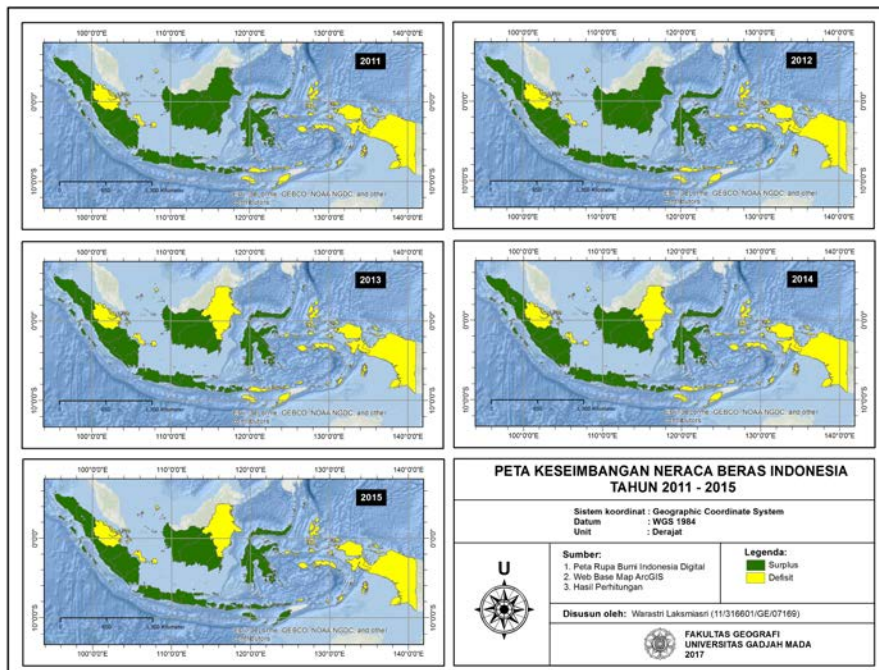
Pada tingkat nasional, berdasarkan kondisi produksi beras dalam negeri (tanpa impor) dan kebutuhannya, selama kurun waktu lima tahun ini Indonesia mengalami surplus beras yang berkisar antara 16 juta ton hingga 22 juta ton (Tabel 1). Jumlah tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan beras masyarakat Indonesia selama lima tahun ini masih dapat diimbangi dengan peningkatan produksi berasnya, walau tanpa impor.

Provinsi-provinsi yang pernah memiliki neraca beras defisit adalah Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Untuk dapat memenuhi kekurangan kebutuhan beras, provinsi-provinsi tersebut harus mendatangkan beras dari provinsi lain atau mengimpornya dari negara lain. Provinsi yang mengalami defisit beras tertinggi adalah DKI Jakarta dengan kisaran defisit 500 juta kg hingga 600 juta kg. Adapun provinsi yang mengalami surplus beras terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur dengan kisaran 3.000 juta kg hingga 4000 juta kg.

Tabel 1. Neraca Beras Indonesia Tahun 2011 - 2015

Tahun	Produksi	Konsumsi	Keseimbangan
2011	38.757.329.640	21.773.707.562	16.983.622.078
2012	40.701.901.644	21.412.754.808	19.289.146.836
2013	41.938.975.855	21.277.860.052	20.661.115.803
2014	41.680.502.512	21.346.917.835	20.333.584.677
2015	44.352.112.205	21.728.426.202	22.623.686.002
Rata-rata	41.486.164.371	21.507.933.292	19.978.231.079

Indonesia selama lima tahun ini rata-rata mengimpor beras sebesar 1.347.855 ton. Seiring dengan perkembangan pro-kontra impor beras yang dihadapi Indonesia, izin impor beras di Indonesia semakin diperketat. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008, importir swasta maupun BULOG dapat mengimpor beras pada kapanpun dan jenis apapun, asalkan mengajukan izin impor kepada Menteri Perdagangan. Hal ini menjadikan jumlah impor beras pada tahun 2011 tertinggi pada kurun waktu lima tahun ini. Pada tahun 2012 Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 06/M-DAG-PER/2/2012 berlaku. Isi dari peraturan tersebut adalah pembatasan impor beras. Importir swasta hanya diperbolehkan mengimpor beras premium hingga menengah. Waktu impor pun ditentukan, yaitu tidak pada satu bulan sebelum panen raya hingga dua bulan setelahnya. Peraturan impor beras di Indonesia setelah tahun 2015 semakin ketat, yaitu hanya BULOG yang diperbolehkan mengimpor beras untuk pangan. Pembatasan impor ini bertujuan untuk mengontrol jumlah beras di pasar agar harga beli dari petani tidak anjlok.




Gambar 6. Peta Keseimbangan Neraca Beras Indonesia Tahun 2011 - 2015

Impor beras di Indonesia dilakukan pada beberapa provinsi. Dari tabel-tabel tersebut dapat dilihat pula provinsi-provinsi yang defisit beras lalu mengimpor beras, serta provinsi yang sudah surplus beras namun tetap mengimpor beras (Tabel 2). Provinsi-provinsi yang sudah surplus pada dasarnya tidak perlu melakukan impor beras. Hal ini menunjukkan ketidakefisienan sistem penyediaan beras di Indonesia, khususnya pada provinsi yang sudah mengalami surplus yang cukup besar berdasarkan produksi beras dalam negeri seperti Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Walau begitu, terdapat indikasi pula bahwa beras yang diimpor belum tentu akan dikonsumsi sendiri oleh provinsi yang mengimpor. Dengan kata lain, beras impor tersebut akan didistribusikan ke wilayah lain.

Tabel 2. Status Keseimbangan Neraca Beras per Provinsi di Indonesia Terhadap Impor Beras Tahun 2011 - 2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	S	S	S	S	S
Sumatera Utara	S	S	S	S	S
Sumatera Barat	S	S	S	S	S
Riau	D	D	D	D	D
Jambi	S	S	S	S	S
Sumatera Selatan	S	S	S	S	S
Bengkulu	S	S	S	S	S
Lampung	S	S	S	S	S
Bangka Belitung	D	D	D	D	D
Kepulauan Riau	D	D	D	D	D
DKI Jakarta	D	D	D	D	D
Jawa Barat	S	S	S	S	S
Jawa Tengah	S	S	S	S	S
DI Yogyakarta	S	S	S	S	S
Jawa Timur	S	S	S	S	S
Banten	S	S	S	S	S
Bali	S	S	S	S	S
Nusa Tenggara Barat	S	S	S	S	S
Nusa Tenggara Timur	D	D	D	D	S
Kalimantan Barat	S	S	S	S	S
Kalimantan Tengah	S	S	S	S	S
Kalimantan Selatan	S	S	S	S	S
Kalimantan Timur	S	S	D	D	D
Sulawesi Utara	S	S	S	S	S
Sulawesi Tengah	S	S	S	S	S
Sulawesi Selatan	S	S	S	S	S
Sulawesi Tenggara	S	S	S	S	S
Gorontalo	S	S	S	S	S
Sulawesi Barat	S	S	S	S	S
Maluku	D	D	D	D	D
Maluku Utara	D	D	D	D	D
Papua	D	D	D	D	D
Papua Barat	D	D	D	D	D
Indonesia	S	S	S	S	S

Keterangan:
S = surplus, D = defisit

 = mengimpor beras

Adapun mengenai dinamika ekspor beras, rata-rata ekspor beras di Indonesia selama lima tahun ini sebesar 979 ton. Regulasi yang mempengaruhi dinamika ekspor pada kurun waktu ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 35/M-DAG/PER/8/2009. Berdasarkan peraturan tersebut, beras premium dapat diekspor oleh perusahaan swasta dan BULOG, sedangkan beras dengan kualitas menengah hanya boleh diekspor oleh BULOG. Perubahan dari peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 yang mengatur bahwa swasta hanya boleh mengekspor beras organik. Pada kancah internasional, beras organik memiliki nilai tawar yang lebih.

Ekspor beras di Indonesia dilakukan pada beberapa provinsi di Indonesia, seperti pada Tabel 3. Dari tabel-tabel tersebut dapat dilihat provinsi-provinsi yang mengimpor beras namun juga mengekspor beras pada tahun yang sama. Provinsi-provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Perlu penelitian lebih mendalam mengenai kualitas beras yang dijual dan dibeli pada fenomena ini. Terdapat kemungkinan bahwa beras yang dijual adalah beras berkualitas premium, sedangkan beras yang dibeli berkualitas menengah atau rendah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan margin keuntungan dari perdagangan beras internasional.

Di sisi lain, terdapat pula provinsi yang defisit beras namun tetap mengekspor beras. Provinsi-provinsi yang defisit namun tetap mengekspor

beras beberapa diantaranya adalah Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kondisi provinsi yang defisit beras namun tetap mengekspor beras tersebut dapat mengancam ketahanan pangan provinsi yang bersangkutan. Pemerintah daerah perlu mendatangkan beras dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang belum terpenuhi. Fenomena ini dapat pula memberikan sebuah mengindikasikan bahwa provinsi-provinsi tersebut merupakan berbatasan dengan negara lain atau memiliki bandar udara atau pelabuhan internasional, sehingga pengeksportan beras nasional dikonsentrasikan pada wilayah-wilayah tersebut. Dengan kata lain, sumber beras yang diimpor oleh provinsi yang defisit tersebut belum tentu berasal dari provinsi yang bersangkutan.

Tabel 3. Status Keseimbangan Neraca Beras per Provinsi di Indonesia Terhadap Impor dan Ekspor Beras Tahun 2011 - 2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	S	S	S	S	S
Sumatera Utara	S	S	S	S	S
Sumatera Barat	S	S	S	S	S
Riau	D	D	D	D	D
Jambi	S	S	S	S	S
Sumatera Selatan	S	S	S	S	S
Bengkulu	S	S	S	S	S
Lampung	S	S	S	S	S
Bangka Belitung	D	D	D	D	D
Kepulauan Riau	D	D	D	D	D
DKI Jakarta	D	D	D	D	D
Jawa Barat	S	S	S	S	S
Jawa Tengah	S	S	S	S	S
DI Yogyakarta	S	S	S	S	S
Jawa Timur	S	S	S	S	S
Banten	S	S	S	S	S
Bali	S	S	S	S	S
Nusa Tenggara Barat	S	S	S	S	S
Nusa Tenggara Timur	D	D	D	D	S
Kalimantan Barat	S	S	S	S	S
Kalimantan Tengah	S	S	S	S	S
Kalimantan Selatan	S	S	S	S	S
Kalimantan Timur	S	S	D	D	D
Sulawesi Utara	S	S	S	S	S
Sulawesi Tengah	S	S	S	S	S
Sulawesi Selatan	S	S	S	S	S
Sulawesi Tenggara	S	S	S	S	S
Gorontalo	S	S	S	S	S
Sulawesi Barat	S	S	S	S	S
Maluku	D	D	D	D	D
Maluku Utara	D	D	D	D	D
Papua	D	D	D	D	D
Papua Barat	D	D	D	D	D
Indonesia	S	S	S	S	S

Keterangan:
S = surplus, D = defisit
 = mengimpor beras
 = mengekspor beras
 = mengimpor dan mengekspor beras

KESIMPULAN

Pada skala nasional, Indonesia surplus beras. Sebagian besar provinsinya memiliki neraca beras positif, namun masih ada pula yang memiliki neraca beras negatif. Kondisi surplus tersebut tidak merata di seluruh provinsi pada umumnya kondisi geografisnya yang merupakan kepulauan sehingga lahan pertaniannya terbatas. Adapun DKI Jakarta dan Kalimantan Timur mengalami defisit beras karena disebabkan oleh jumlah penduduknya yang banyak. Untuk dapat memenuhi kekurangan kebutuhan beras, provinsi-provinsi yang mengalami defisit beras tersebut harus mendatangkan beras dari provinsi lain atau mengimpornya dari negara lain.

Banyak provinsi yang sudah surplus beras namun tetap melakukan impor beras. Hal ini hanya akan menambah jumlah surplus beras yang ada pada wilayah tersebut serta menunjukkan ketidakefisienan sistem penyediaan beras di Indonesia, khususnya pada provinsi yang sudah mengalami surplus yang cukup besar (yang bersumber dari produksi beras dalam negeri). Di sisi lain, terdapat provinsi yang defisit beras namun mengeksport beras. Kejadian ini dapat mengancam ketahanan pangan pada wilayah tersebut, sehingga pemerintah daerah perlu mendatangkan beras dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya

DAFTAR PUSTAKA

Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Daerah Istimewa

Yogyakarta. 2016. *Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2015 (Sementara)*. Yogyakarta: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta

BPS. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. Jakarta: BPS.

BPS. (2012). *Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2012*. Jakarta: BPS.

BPS. (2013). *Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2013*. Jakarta: BPS.

BPS. (2014). *Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. (2015). *Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

FAO. (t.t.). *Food Balance Sheets*. Diterima 18 Desember 2016, di <http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS>.

Fahriyah, F., & Nugroho, C. P. (2016). Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sidoarjo. *Agricultural Socio-Economics Journal*, 15(3), 155.

GRiSP. (2013). *Rice Almanac*. Edisi keempat. Los Baños (Filipina): International Rice Research Institute.

Jhamtani, H. (2008). *Lumbung Pangan: Menata Ulang Kebijakan*

- Pangan*. Yogyakarta:
INSISTPress.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi*. Jakarta: Kementrian Pertanian.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Sayekti, A. (2002). Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Wilayah Historis Pangan Beras dan Non Beras di Wilayah Indonesia. *Disertasi, Tesis*. INSTIPER. Yogyakarta.
- Verstappen, H. Th. (2013). *Garis Besar Geomorfologi Indonesia*, (Diterjemahkan oleh Sutikno), Suratman (Editor). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.